



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.466.633.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.337.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.570.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.767.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.653.021.467.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.166.591.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019 Tgl 24 Sept 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.219.309.940.000,00	DAK Non Fisik Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019 T
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	403.544.936.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019 Tgl 24 Sept 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	771.274.068.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	148.846.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	200.326.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.751.798.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019 Tgl 24 Sept 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 8	Pendapatan Lain-Lain	361.348.720.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019 Tgl 24 Sept 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	607.109.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	607.109.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	56.453.000.000,00	Permendagri 13 Tahun 2018
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	20.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.000.000.000,00	UU 23 Tahun 2014
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	502.306.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	Permendagri 13 Tahun 2006
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.859.523.915.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.767.498.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	30.767.498.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	16.767.498.000,00	